



RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN SEI MENGGARIS

2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sei Menggaris tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman bagi seluruh perangkat Kecamatan Sei Menggaris dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di tahun 2025.

Penyusunan Renja Kecamatan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan strategis dan operasional yang melibatkan berbagai pihak terkait, baik dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Dalam proses penyusunannya, kami telah mengakomodasi aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan kondisi aktual wilayah Kecamatan Sei Menggaris dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Kecamatan Sei Menggaris tahun 2025 ini berisi tentang arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan dapat terwujud sinergi yang baik antara pemerintah kecamatan, desa, serta seluruh elemen masyarakat dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renja ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di Kecamatan Sei Menggaris.

Sei Menggaris, 26 April 2024

Camat,



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	9
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN	
RENSTRA SKPD.....	9
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD.....	15
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPMD.....	17
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	18
2.5. PENELAHAH USULAN PROGRAM/KEGIATAN MASYARAKAT.....	24
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	25
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	25
3.2. TUJUAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	26
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	27
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	35
BAB IV. PENUTUP	41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD.

Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan RENJA Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan/sub kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan/sub kegiatan, analisis kinerja pelayanan kecamatan, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan/sub kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Kewilayahan.

Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Nunukan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan Kecamatan dalam bidang Kewilayahan dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Nunukan 2021 – 2026 yaitu “ **Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil Dan Sejahtera** “.

Tahun Anggaran 2025 adalah tahun Keempat pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan 2021-2026, dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar penyusunan rencana kerja Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah., (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah., (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, ; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Tentang Kelurahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah., (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);:
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 80/9/2021).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);
27. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 65);
28. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Maksud di susunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah;

- ☐ Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan keuangan daerah dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025
- ☐ Melakukan Sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2025

1.3.2. TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah :

- Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Nunukan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terutama di bidang Kewilayahan.
- Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
- Sebagai instrument untuk mengukur capaian target kinerja penyelenggaraan kegiatan/sub kegiatan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah , serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-3), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan/sub kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya..

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program dan kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program dan kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan/sub kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing,

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31:

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional,

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD,

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan/Sub Kegiatan Misal:
 - b. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - c. Pencapaian SDGs,
 - d. Pengentasan kemiskinan,
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - f. Pengembangan daerah terisolir,
 - g. Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan/sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan/sub kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan/sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**BAB V. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut
Pada bagian lembar terakhir di cantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah,serta capaian pemerintah daerah yang bersangkutan

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEI MENGGARIS TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SEI MENGGARIS

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja Program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kecamatan Sei Menggaris pada tahun 2023

Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan tahun 2023, dalam pelaksanaan program dan kegiatan/sub keiatannya mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021, Alokasi anggaran Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan pada Tahun 2023 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan di dalam DPA SKPD Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan yang ditetapkan Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 2.230.114.319,00** dan realisasi anggaran (per 31 Desember 2023) sebagaimana terinci di dalam tabel berikut:

URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN	
		(Rp)	(%)
BELANJA DAERAH	2.230.114.319,00	2.125.707.701,00	95,32
BELANJA OPERASI	1.974.346.319,00	1.871.860.793,00	94,81
Belanja Pegawai	1.379.789.127,00	1.284.152.785,00	93,07
Belanja Barang dan Jasa	594.557.192,00	587.708.008,00	98,85
BELANJA MODAL	255.768.000,00	253.846.908,00	99,25

Dari table di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan bahwa realisasi penggunaan anggaran pada Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan sampai 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.2.125.707.701,00** atau **95,32%**

Anggaran Belanja Operasi pada Kecamatan Sei Menggaris dipergunakan untuk pelaksanaan 1 (satu) program rutin dan 3 (Tiga) program pembangunan/ teknis, antara lain:

- a. Program Penunjang urusan pemerintah daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c. Program Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Selengkapnya realisasi anggaran belanja langsung per program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Sei Menggaris Kab. Nunukan TA. 2023 sebagaimana tabel berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			(Rp.)	KEUANGAN (Rp.)	Keuangan (%)
1	2		3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.196.016.229,00	2.091.699.651,00	95,25
1	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 5.800.000	Rp 5.800.000	100,00
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 21.750.000	Rp 21.710.000	99,82
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.379.789.127	Rp 1.284.152.785	93,07
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 1.372.360	Rp 1.372.360	100,00
	5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 266.618.000	Rp 264.690.387	99,28
	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 15.676.430	Rp 15.480.130	98,75
	7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 7.630.260	Rp 7.623.480	99,91
	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 117.072.800	Rp 117.072.200	100,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 30.000.000	Rp 29.971.000	99,90
	10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 274.561.392	Rp 269.362.039	98,11
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 75.745.860	Rp 74.465.270	98,31
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		18.718.090,00	18.698.050,00	99,89
6	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
	12	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 18.718.090	Rp 18.698.050	99,89
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		5.720.000,00	Rp 5.670.000	99,13
7	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
	13	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 5.720.000	Rp 5.670.000	99,13
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		9.660.000,00	9.640.000,00	99,79
8	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
	14	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp 9.660.000	Rp 9.640.000	99,79

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan/sub kegiatan diukur sampai sejauhmana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun.

SKPD Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan telah memberikan hasil yang signifikan sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian dan realisasi yang akan disajikan dalam capaian kinerja tahun 2023.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan tahun 2023 dapat dilihat dari berbagai indikator terlampir

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerangkat Daerah)Tahun 2023	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-1)			Target programdan kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024 n-4)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di TingkatKecamatan	100 Usulan	100 Usulan	100 Usulan	100 Usulan	100 %	100 Usulan	100 Usulan	100%
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100%
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	4 Laporan	4 Laporan	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	4 Laporan	4 Laporan	

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentramandan Keindahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penegakan Perda danPerkada yang dilaksanakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100%
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas danFungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yangprofesional	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan desa dan kelurahanyang di bina dan di awasi	4 Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa	100 %	4 Desa	4 Desa	100 %
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi TataPemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100%
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah Yang Berkualitas	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100 %	6 Laporan	6 Laporan	100 %
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0 %	0 Laporan	2 Laporan	0 %

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja	100 %	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja	100 %
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/Bulan	10 Orang/Bulan	10 Orang/Bulan	10 Orang/Bulan	100 %	10 Orang/Bulan	10 Orang/Bulan	100 %
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan AkuntansiSKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi danPelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	0 %
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja	100 %	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja	100 %
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	2000%
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak danPenggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jaspapunjang	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja	100 %	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja	100 %
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja	100 %	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja	100 %
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit		5 Unit	3 Unit	0 %
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	3 Unit	0 Unit	0 Unit		3 Unit	0 Unit	0 %

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEI MENGGARIS

Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri 86 Tahun 2017. Jenis indikator yang dikaji terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan

Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan merupakan unsur pelaksana urusan Kecamatan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kewilayahan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Nunukan periode tahun 2021-2026, Kecamatan Sei Menggaris memiliki tantangan untuk membantu Kepala Daerah dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pemantapan pembangunan perdesaan. Untuk dapat terciptanya Program tersebut diatas maka peran serta Kecamatan Sei Menggaris dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan terhadap masyarakat dan akan mendorong penguatan pemerintahan desa dalam hal pembangunan Perdesaan, pengembangan usaha ekonomi dan keuangan perdesaan.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil dalam (outcomes) manfaat (benefits) dan dampak (impach). Indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini di ikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan

NO	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Tahun Ke -					Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun Ke -			Proyeksi	Catatan Analisis
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				Persen	87,15	87,25	87,50	87,75	87,88	87,15	87,25	87,25	87,50	

2.3 . ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN

TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEI MENGGARIS

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan/sub kegiatan tahun 2023, dapat dikatakan hasilnya cukup Baik. Adapun isu-isu Strategis Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sei Menggaris Sebagai Berikut :

- a. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Sei Menggaris, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personal;
- b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses Pelayanan;
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media social menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban dan keamanan masyarakat; dan
- d. Terhambatnya Pelaksanaan Pemberdayaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan desa dikarenakan Lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyelesaikan Masalah Pemberdayaan Masyarakat di Desa/kelurahan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan diatas kecamatan Sei Menggaris ,dalam pelaksanaan urusan Kecamatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan/Sub kegiatan tahunan yang dilaksanakan, menjadi hal yang mutlak dilakukuan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

VISI : Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera			
MISI 4 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinasmin, serta memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Melaksanaka penyebaran kuisisioner kepada masyarakat guna mengukur dan mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan di kecamatan.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan, RPJMD Kabupaten Nunukan merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan Nasional sebagai mana diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 adalah tahapan Pertama dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2011 – 2030.RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap Tahunnya.

Berdasarkan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025, maka program dan kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan/sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja utama pemerintah Kabupaten Nunukan, dalam proses pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Nunukan.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Nunukan, maka kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut perlu mengambil langkah kongrit dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten

Nunukan, maka Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan melaksanakan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa dengan melihat aspek sosial budaya masyarakat
2. Mengoptimalkan Kerjasama antar desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di perdesaan dan kawasan perdesaan
3. Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan, SDM apartur desa dan PBD
4. Mengoptimalkan pemberdayaan kelompok, lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Adat di desa dalam mengelola potensi sumber daya ekonomi

Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan merupakan sebuah misi yang sesuai dengan amanat Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Bahwa desa memiliki otonomi yang disebut sebagai otonomi desa, untuk mengembangkan dirinya menjadi desa yang lebih berdaya,maju, dan mandiri. Konsep otonomi desa tersebut dijabarkan dalam kewenangan – kewenangan desa, antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa, tata kelola pembangunan lokal skala desa dan kawasan perdesaan, pengembangan perekonomian desa berbasis kelembagaan ekonomi (Badan Usaha Milik Desa/BUMDesa), pengembangan kerjasama desa, pengembangan partisipasi masyarakat melalui kelembagaan masyarakat (LPM), penggalian dan pelestarian nilai – nilai adat dan budaya skala desa, dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) berbasis pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Dengan harapan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat secara berkesinambungan.

Berikut **Tabel 2.4** Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut ;

Tabel 2.4 (TC-31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					KECAMATAN SEIMENGGARIS				2.573.767.072,00	KECAMATAN SEIMENGGARIS				2.573.767.072,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.573.767.072,00	UNSUR KEWILAYAHAN				2.573.767.072,00	
7	01				KECAMATAN				2.573.767.072,00	KECAMATAN				2.573.767.072,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100%	2.469.487.392,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100%	2.469.487.392,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitasPerangkat Daerah Yang Berkualitas	8 Dokumen	20.300.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitasPerangkat Daerah Yang Berkualitas	8 Dokumen	20.300.000,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.760.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.760.000,00	KECAMATAN SEIMENGGARIS
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	7.760.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	7.760.000,00	KECAMATAN SEIMENGGARIS

7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.780.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.780.000,00	KECAMATAN SEIMENGGARIS
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	5 Unit Kerja	1.626.230.262,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	5 Unit Kerja	1.626.230.262,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	1.598.030.262,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	1.598.030.262,00	KECAMATAN SEIMENGGARIS
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	28.200.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	28.200.000,00	KECAMATAN SEIMENGGARIS
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	5 Unit Kerja	304.617.950,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	5 Unit Kerja	304.617.950,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.371.600,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.371.600,00	KECAMATAN SEIMENGGARIS
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	89.120.800,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	89.120.800,00	KECAMATAN SEIMENGGARIS
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	20.109.500,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	20.109.500,00	KECAMATAN SEIMENGGARIS
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.266.050,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.266.050,00	KECAMATAN SEIMENGGARIS

7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	185.750.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	185.750.000,00	KECAMATAN SEIMENGGARIS
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	5 Unit Kerja	327.777.920,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	5 Unit Kerja	327.777.920,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	43.800.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	43.800.000,00	KECAMATAN SEIMENGGARIS
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	283.977.920,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	283.977.920,00	KECAMATAN SEIMENGGARIS
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	5 Unit Kerja	190.561.260,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	5 Unit Kerja	190.561.260,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	72.601.260,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	72.601.260,00	KECAMATAN SEIMENGGARIS
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	9.460.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	9.460.000,00	KECAMATAN SEIMENGGARIS
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	108.500.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	108.500.000,00	KECAMATAN SEIMENGGARIS
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 %	70.730.080,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 %	70.730.080,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Usulan	41.065.040,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Usulan	41.065.040,00	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	30.065.040,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	30.065.040,00	KECAMATAN SEIMENGGARIS

7		01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	11.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	11.000.000,00	KECAMATAN SEIMENGGARIS							
7		01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 Laporan	29.665.040,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 Laporan	29.665.040,00								
7		01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	29.665.040,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	29.665.040,00	KECAMATAN SEIMENGGARIS							
7		01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)	100 %	15.749.600,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)	100 %	15.749.600,00								
7		01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 laporan	15.749.600,00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 laporan	15.749.600,00								
7		01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	15.749.600,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	15.749.600,00	KECAMATAN SEIMENGGARIS							
7		01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	17.800.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	17.800.000,00								
7		01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi	4 desa	17.800.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi	4 desa	17.800.000,00								
7		01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	17.800.000,00	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	17.800.000,00	KECAMATAN SEIMENGGARIS							
J U M L A H										2.573.767.072,00		J U M L A H										2.573.767.072,00	

2.5. PENELAHAN USULAN PROGRAM KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2024 disamping berpedoman pada Renstra Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 serta Tidak Mengakomodir Usulan Masyarakat tetapi hanya meneruskan kan ke OpD yang Menangani dalam Rapat Musrembang Tingkat Kecamatan, Kewilayahan Maupun Musrembang RKPD tingkat Kabupaten

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan berpedoman pada kebijakan nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara maupun Kabupaten Nunukan. Salah satu agenda pembangunan global dalam Milenium Development Goals (MDG's).

Keberhasilan pembangunan tingkat Desa akan mendorong dan berimbas pada kemajuan dan keberhasilan Pembangunan Daerah. Sehingga dibutuhkan koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang dimaksud dengan “pelaku pembangunan” adalah Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota), dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di Pemerintah juga mencakup antara pelaksana dengan perencana pembangunan. Sehingga mampu terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ditingkat Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people centered development), yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth), Keadilan Antar Generasi (Intergenerational equity) dan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Maka Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan merespon isu-isu dan kebijakan nasional tersebut dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, berbasis potensi yang dimiliki oleh desa. Dan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam mewujudkan percepatan pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan telah mengalokasikan dana untuk Program dan kegiatan di desa.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.2.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan dalam melaksanakan misi. Tujuan dirancang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (dassolen) dan kenyataan (das sein) pada kurun waktu tertentu.

Adapun tujuan dari Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2021 s/d 2026 adalah

1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Berkualitas

3.2.2 SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya alam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Dalam merumuskan sasaran harus memperhatikan criteria SMART-C yaitu:

- a. *Specific (spesifik)*, yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas,
- b. *Measurable (dapat diukur)*, yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur,
- c. *Achievable (dapat dicapai)*, yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada,
- d. *Relevant (relevan)*, yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan
- e. *Time Limit (Batas waktu)*, yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan , dan
- f. *Continously improve (perbaikan berkelanjutan)*, yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap

Sasaran merupakan bagian intergral dalam sistem perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulan, bulanan.

Untuk mencapai tujuan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan menetapkan sasaran strategis 2021 s/d 2026 sebagai penjabaran dari Program dan kegiatan/sub kegiatan yang ada pada Kecamatan Sei menggaris Kabupaten Nunukan, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sei Menggaris Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan PD selanjutnya disusun dalam tabel 3.2 sebagai berikut

Tabel 3.2
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sei Menggaris
Kabupaten Nunukan 2021 -2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sei Menggaris	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	87,15	87,25	87,5	87,75	87,88
			Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien	Persen	100	100	100	100	100
			Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	Persen	100	100	100	100	100
			Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	Persen	100	100	100	100	100
			Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100

3.3. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nunukan serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 - 2026 dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD, maka rencana program dan kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Belanja Langsung terdiri dari :
- 1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang/Jasa
 - 2. Belanja Modal
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini merupakan program rutin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan bertujuan untuk menjamin kelancaran pelayanan Kantor. Adapun rincian kegiatan /sub kegiatan adalah sebagai berikut :

 - 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini mendukung kebijakan Indeks Kepuasan Masyarakat Adapun rincian kegiatan program adalah sebagai berikut :

6. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Sub Kegiatan Fasilitas Tata Wilayah Desa
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

III. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini mendukung kebijakan Indeks Kepuasan Masyarakat.. Adapun rincian kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

8. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

IV. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini bertujuan untuk mendukung Indeks Kepuasan Masyarakat dengan rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

9. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sei Menggaris
Kabupaten Nunukan
Kecamatan Sei Menggaris

Kode					RENCANA TAHUN 2025							Catatan Penting (Sumber Usulan)	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokas i	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
2					3	4	5	6	7	8	9		1 0	1 1
					KECAMATAN SEIMENGGARIS				2.573.767.072,00					2.573.767.072,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.573.767.072,00					2.573.767.072,00
7	01				KECAMATAN				2.573.767.072,00					2.573.767.072,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tatakelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah		100%	2.469.487.392,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas		100%	2.469.487.392,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitasPerangkat Daerah Yang Berkualitas		8 Dokumen	20.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas		8 Dokumen	20.300.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	7.760.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas		2 Dokumen	7.760.000,00

7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	4 Laporan	7.760.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	4 Laporan	7.760.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	2 Laporan	4.780.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	2 Laporan	4.780.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	5 Unit Kerja	1.626.230.262,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	5 Unit Kerja	1.626.230.262,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	10 Orang/bulan	1.598.030.262,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	10 Orang/bulan	1.598.030.262,00
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	28.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	4 Dokumen	28.200.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	5 Unit Kerja	304.617.950,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	5 Unit Kerja	304.617.950,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	1 Paket	2.371.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	1 Paket	2.371.600,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	1 Paket	89.120.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	1 Paket	89.120.800,00

7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	3 Paket	20.109.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	3 Paket	20.109.500,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	2 Paket	7.266.050,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	2 Paket	7.266.050,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	2 Laporan	185.750.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	2 Laporan	185.750.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	5 Unit Kerja	327.777.920,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	5 Unit Kerja	327.777.920,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	3 Laporan	43.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	3 Laporan	43.800.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	2 Laporan	283.977.920,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	2 Laporan	283.977.920,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	5 Unit Kerja	190.561.260,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	5 Unit Kerja	190.561.260,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	5 Unit	72.601.260,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	5 Unit	72.601.260,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	5 Unit	9.460.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	5 Unit	9.460.000,00

7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	3 Unit	108.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	3 Unit	108.500.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien		100 %	70.730.080,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	100 %	70.730.080,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahandi Tingkat Kecamatan		100 Usulan	41.065.040,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	100 Usulan	41.065.040,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan PelaksanaanKegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan PerangkatDaerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	2 Laporan	30.065.040,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	2 Laporan	30.065.040,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahandi Tingkat Kecamatan	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	11.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	1 Dokumen	11.000.000,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	4 Laporan	29.665.040,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	4 Laporan	29.665.040,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	29.665.040,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	4 Laporan	29.665.040,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)		100 %	15.749.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	100 %	15.749.600,00

7	01	04	2.0 2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas danFungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		4 laporan	15.749.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	4 laporan	15.749.600,00
7	01	04	2.0 2	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas danFungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	4 Laporan	15.749.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	4 Laporan	15.749.600,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100 %	17.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	100 %	17.800.000,00
7	01	06	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi		4 desa	17.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	4 desa	17.800.000,00
7	01	06	2.0 1	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Nunukan,Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	4 Laporan	17.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	4 Laporan	17.800.000,00
J U M L A H									2.573.767.072,00				2.573.767.072,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kinerja pada Tahun 2025 merupakan gambaran Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sei Menggaris Kab.Nunukan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sei Menggaris

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting (Sumber Usulan)	
						Indikator Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Dana		
2					3	4	6		7		8	9	
					KECAMATAN SEIMENGGARIS						2.573.767.072,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.573.767.072,00		
7	01				KECAMATAN						2.573.767.072,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan,dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.469.487.392,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitasPerangkatDaerah Yang Berkualitas	Dokumen	8	20.300.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.760.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas	

7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	7.760.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	4.780.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	Unit Kerja	5	1.626.230.262,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	10	1.598.030.262,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	4	28.200.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	Unit Kerja	5	304.617.950,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.371.600,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	89.120.800,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas

7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	20.109.500,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	7.266.050,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	185.750.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	Unit Kerja	5	327.777.920,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	43.800.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	283.977.920,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	Unit Kerja	5	190.561.260,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	72.601.260,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	9.460.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas

7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	108.500.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	%	100	70.730.080,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Usulan	100	41.065.040,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2	30.065.040,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	11.000.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan	4	29.665.040,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	29.665.040,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)	%	100	15.749.600,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas

7	1	04	2.0 2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan	4	15.749.600,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	04	2.0 2	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	15.749.600,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	17.800.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	06	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi	desa	4	17.800.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
7	01	06	2.0 1	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	4	17.800.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Prioritas
J U M L A H									2.573.767.072,00			

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sei Menggaris.

Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan (Renja), yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan Sei Menggaris, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan maupun dilingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan tahun 2025, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Kabupaten Nunukan 2021-2026 : **“Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil, Dan Sejahtera”**.

Nunukan, 26 April 2024
Camat,

